

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- \_\_\_\_\_ dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Bambang Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017
- Encep Saefullah, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cet. 2*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- H.R. Daeng Naja, *Contract Drafting*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku I*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung: Alumni, Bandung, 1999
- Joko dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Kepel Press, 2021
- Leonora dan Dhansham Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Sidoarjo: ZitaFama Jawara, 2018
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Studi Pembelajaran Penanganan Covid-19 Indonesia*, 2021.
- Maria, Sumardjono, *Bahan Kuliah (Metodologi Penelitian Ilmu Hukum)*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021.

- Mariam Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2014
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern*, Bandung: Chitra Aditya Bahkti, 2002.
- Nasution, Johan. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008
- Peter, Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017
- Richo Andi Wibowo, *Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan, Regulasi dan Kajian Putusan*, Jakarta: Perdana Media Group, 2021
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2017
- Sari Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020
- Sri, Surini dan Akhmad, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2005
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Surojo, Wignojodiputro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1983
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1987
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1989
- Wirjono, Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Sumur, 1981
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Perdata, Cet. VI*, Bandung: Sumur, 1974

## **JURNAL**

- Amad Gunardi, “Kebijakan Penyelenggaraan Penerbangan di Masa Pandemi Covid-19”, (September, 2021), 66.

Ariawan dan Indah, “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Kontrak Bisnis di Indonesia”, (Publikasi Ilmiah Kontemporer UNTAR, Jakarta: Untar Press, 2021), 119.

Ariwibowo dan Yasarman, “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa”, *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* Vol. VI, No. 2, (Desember, 2022): 381.

Lailatu Mufidah dan Kukuh Tejomurti, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19)”. *Jurnal Law Review XX*, No. 3 (Maret 2021): 80-279.

Moh Syaeful Bahar, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha”. (*Jurnal Legisla* Vol. 14 No. 2, 2022), 227.

Nugraha, “Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Hukum Perdata di Indonesia” *Journal of Lex Generalis (JLG)*. Vol. 2. No. 3 (Maret, 2021), 921.

Tresna, Meiske, Josina, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Akibat Wanprestasi”, (*Lex Privatum* Vol. XI/No. 4/Mei/2023): 4

Triasti dan Deby, Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. *Jurnal Syntax Admiration* Vol. 2 No. 5, (May, 2021): 36.

Tjoanda, Merry, “Kekuatan Mengikat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal SASI* Vol. 26 No. 3, (Juli-September 2020): 403.

Hamidi, “Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Penelitian Di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam)”. (Riau: Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kepulauan, 2020): 7

## **TESIS**

Roni, Fauzy “Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan PPAT oleh Putusan Pengadilan Negeri Padang (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor:

03/PDT.G/2008/PN.PDG tanggal 07 Juli 2008)”, Tesis Program Magister, Universitas Indonesia, 2010.

## **INTERNET**

Erizka, Permatasari, “Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak”, Hukum *Online*, 9 Maret 2023 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak-lt617a88d958bb9/> (diakses 28 Agustus 2024).

Irfan Kamil, “Kemenkes Wanprestasi Pembelian APD, Dihukum Bayar Rp 316 Miliar”, Kompas, 30 Juni 2023 [https://nasional.kompas.com/read/2023/06/30/19345081/kemenkes-wanprestasipembelianapddihukumbayarrp316miliar?utm\\_source=Various&utm\\_medium=Referral&utm\\_campaign=Top\\_Desktop](https://nasional.kompas.com/read/2023/06/30/19345081/kemenkes-wanprestasipembelianapddihukumbayarrp316miliar?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop) (diakses 22 Juli 2024).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 593)

Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766)

Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Covid-19;

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No. 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 272/PDT.G/2022/PN.JKT.SEL

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 165/Pdt.G/2024/PN Jkt Sel

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1133/PDT/2023/PT.DKI

Putusan Mahkamah Agung No.4431 K/Pdt/202